

Hambatan Akses Permodalan terhadap Keberlanjutan UMKM di Kabupaten Grobogan

Endah Tri Sulistyorini*

Bappeda Kabupaten Grobogan, Indonesia

*Penulis Korespondensi: endahgema81@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the financing access barriers faced by Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Grobogan Regency and their impact on business sustainability. The main challenges examined include limited understanding of loan procedures, low financial literacy, collateral requirements, and lack of trust in formal financial institutions. The research employed a case study design with a descriptive qualitative approach, complemented by quantitative data collected through Likert-scale questionnaires. Data were obtained from surveys, interviews, FGDs, field observations, and secondary sources from government agencies and financial institutions. The results reveal that most MSMEs still rely on personal savings, with 53% of respondents not understanding loan procedures and 68% never attending financial training. Pearson correlation tests indicate no significant relationship between financial literacy and access to finance. SWOT analysis highlights the need for community-based financing models, enhanced literacy programs, and simplified banking procedures. In conclusion, improving financial literacy alone is insufficient; policy synergy, extensive outreach, and institutional support are essential to ensure inclusive and sustainable financing for MSMEs.*

Keywords: *Access to Capital; Business Sustainability; Financial Literacy; Inclusive Financing; MSMEs*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan akses permodalan yang dihadapi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Grobogan serta dampaknya terhadap keberlanjutan usaha. Permasalahan utama yang dikaji mencakup keterbatasan pemahaman prosedur pembiayaan, rendahnya literasi keuangan, syarat agunan, serta tingkat kepercayaan terhadap lembaga keuangan formal. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang diperkuat oleh data kuantitatif melalui kuesioner skala Likert. Data dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara, FGD, observasi lapangan, serta data sekunder dari OPD dan lembaga keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas UMKM masih bergantung pada tabungan pribadi, dengan 53% responden belum memahami prosedur pinjaman dan 68% belum pernah mengikuti pelatihan keuangan. Uji korelasi Pearson menunjukkan tidak adanya hubungan signifikan antara literasi keuangan dan akses permodalan. Analisis SWOT menyatakan bahwa perlunya strategi berbasis komunitas, penguatan literasi, serta penyederhanaan prosedur perbankan. Kesimpulannya, peningkatan literasi keuangan saja tidak cukup; perlu sinergi kebijakan, sosialisasi masif, serta dukungan kelembagaan agar UMKM dapat mengakses pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Akses Permodalan; Keberlanjutan Usaha; Literasi Keuangan; Pembiayaan Inklusif; UMKM

1. LATAR BELAKANG

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi fondasi utama perekonomian Indonesia. Data Kementerian Koperasi dan UKM (2023) menunjukkan bahwa UMKM menyumbang lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap hingga 97% tenaga kerja (Sinha, 2024). Di Kabupaten Grobogan, jumlah UMKM meningkat pesat dalam satu dekade terakhir, seiring dengan pertumbuhan sektor pengolahan hasil pertanian, kerajinan, kuliner, dan jasa berbasis komunitas. Namun, di balik pertumbuhan tersebut, akses terhadap permodalan yang layak dan berkelanjutan masih menjadi kendala utama bagi kesinambungan usaha.

Permasalahan akses permodalan ini bersifat sistemik dan multidimensi. Di satu sisi, pelaku UMKM menunjukkan inovasi dan kreativitas dalam menciptakan produk dan jasa.

Namun di sisi lain, mereka menghadapi kesulitan mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Ketiadaan agunan, rendahnya literasi keuangan, dan keterbatasan pemahaman terhadap prosedur kredit menjadi hambatan nyata. Hambatan ini tidak hanya menghambat ekspansi usaha, tetapi juga meningkatkan kerentanan terhadap pembiayaan informal dengan bunga tinggi (Mashenene, 2015). Hasil observasi lapangan dan FGD awal mengungkapkan bahwa mayoritas pelaku UMKM tidak memiliki pencatatan keuangan, tidak memahami alur pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta merasa enggan berurusan dengan lembaga keuangan formal karena dianggap tidak ramah terhadap usaha kecil (Sugiharti et al., 2024).

Permasalahan serupa juga terjadi di banyak negara berkembang. Laporan *International Finance Corporation* IFC (2022) memperkirakan adanya kekurangan pembiayaan (*financing gap*) sebesar USD 5,2 triliun per tahun bagi UMKM di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Kajian Beck & Demircuc-Kunt (2006) menegaskan bahwa keterbatasan akses keuangan menjadi penghambat utama pertumbuhan dan produktivitas UMKM. Di Indonesia, laporan Bank Indonesia (2023) menyebutkan bahwa hanya sekitar 20% UMKM yang memiliki akses ke kredit formal, sementara lebih dari 60% tidak memahami prosedur lembaga keuangan. Data ini memperkuat bukti bahwa keberlanjutan usaha tidak dapat dilepaskan dari faktor keterjangkauan, pemahaman, dan kepercayaan terhadap sistem permodalan (Zhang, 2025).

Berbagai studi nasional dan lokal telah berupaya mengatasi permasalahan ini, dengan fokus pada kebijakan lembaga keuangan, persyaratan agunan, dan suku bunga (Zhao, 2024). Studi lain menekankan pentingnya edukasi dan literasi keuangan dalam meningkatkan keberhasilan pengajuan kredit (Clark, 2013). Pemerintah juga telah meluncurkan sejumlah program, seperti KUR, pelatihan manajemen keuangan, serta program subsidi “Kumda Dewi Sri”.

Kekurangan dari berbagai pendekatan kebijakan dan penelitian sebelumnya terletak pada dua hal utama. Pertama, banyak penelitian masih menggunakan pendekatan umum dan formal yang tidak menyentuh realitas hidup pelaku UMKM di daerah, terutama dalam memahami uang, menjalankan usaha, dan memandang lembaga keuangan. Kedua, masih terbatas kajian empirik yang secara khusus mengaitkan akses permodalan dengan keberlanjutan usaha di tingkat lokal, terutama di wilayah rural seperti Kabupaten Grobogan yang memiliki karakteristik informal yang kuat.

Berdasarkan kondisi tersebut, perlu dilakukan kajian mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi keterbatasan akses permodalan UMKM di Kabupaten Grobogan, sesuai dengan kondisi nyata dan karakteristik lokal. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk

mengidentifikasi hambatan internal dan eksternal, tetapi juga untuk mengkaji dampaknya terhadap keberlanjutan usaha. Dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT, penelitian ini berupaya merumuskan strategi dan rekomendasi kebijakan yang aplikatif, inklusif, dan berbasis konteks lokal. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang lebih responsif terhadap kebutuhan riil UMKM serta mendukung terciptanya ekosistem pembiayaan yang adil dan berkelanjutan di tingkat lokal.

Penelitian ini berpijak pada lima pendekatan teoretis untuk menganalisis permasalahan akses permodalan UMKM. Teori Akses terhadap Pembiayaan Beck & Demircug-Kunt (2006) menjelaskan bahwa kendala keuangan berasal dari sisi permintaan dan penawaran, khususnya di negara berkembang. Teori Literasi Keuangan Lusardi et al. (2011) menekankan pentingnya pengetahuan dan keterampilan finansial dalam mengambil keputusan yang tepat. Untuk menilai keberlanjutan usaha, pendekatan *Triple Bottom Line* Elkington (1997) menyoroti keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Analisis SWOT Humphrey (2005) digunakan untuk memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi pelaku usaha. Terakhir, Teori Kelembagaan Scott (2005) menjelaskan bagaimana norma, regulasi, dan struktur kelembagaan membentuk perilaku serta akses pelaku usaha terhadap sumber daya, termasuk modal. Kelima pendekatan ini menjadi dasar analisis hubungan antara hambatan permodalan dan keberlanjutan usaha UMKM di Kabupaten Grobogan.

Dalam konteks pembangunan ekonomi lokal, peran UMKM tidak hanya sebagai penyerap tenaga kerja, tetapi juga sebagai pendorong utama inklusi keuangan dan pengurangan kemiskinan. Namun, banyak pelaku UMKM, terutama di daerah rural seperti Kabupaten Grobogan, masih berada dalam kondisi ekonomi informal yang lemah secara kelembagaan dan finansial. Tantangan utama bukan hanya pada kapasitas usaha, tetapi juga pada hambatan sistemik dalam mengakses permodalan yang adil dan berkelanjutan. Hal ini menjadikan akses pembiayaan bukan sekadar masalah teknis, tetapi persoalan struktural yang berkaitan dengan literasi, regulasi, dan ketimpangan distribusi informasi.

Transformasi akses permodalan dari pendekatan berbasis agunan menuju pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif menjadi penting untuk ditelaah. Selain mengkaji literasi keuangan, perlu dipahami bagaimana kepercayaan, budaya usaha, serta interaksi dengan lembaga keuangan membentuk realitas pembiayaan UMKM di tingkat lokal. Di sinilah letak urgensi riset ini, yaitu untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan permodalan yang telah dirancang secara nasional dan tantangan nyata yang dihadapi pelaku usaha kecil di

lapangan. Pendekatan ini sekaligus memberi ruang untuk memformulasikan strategi kebijakan berbasis data lokal dan konteks sosial.

Permasalahan utama yang dituju dalam penelitian ini adalah mengapa pelaku UMKM di Kabupaten Grobogan masih menghadapi hambatan signifikan dalam mengakses pembiayaan formal, meskipun program-program seperti KUR dan pelatihan keuangan telah tersedia. Penelitian ini menyoroti bahwa literasi keuangan yang dimiliki belum mampu menjawab hambatan struktural dan budaya usaha yang menjadi penghalang utama akses modal. Oleh karena itu, pendekatan semata-mata berbasis edukasi atau pelatihan perlu dilengkapi dengan intervensi kelembagaan dan strategi berbasis komunitas yang lebih mendalam dan berkelanjutan.

Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengidentifikasi hambatan akses permodalan dari sisi internal (kapasitas dan literasi pelaku UMKM) maupun eksternal (kebijakan, kelembagaan, dan kepercayaan terhadap sistem keuangan), serta mengevaluasi dampaknya terhadap keberlanjutan usaha. Secara *state of the art*, penelitian ini memperkaya literatur dengan menggabungkan teori akses keuangan, literasi, dan kelembagaan ke dalam konteks lokal berbasis data empirik dari daerah rural. Temuan ini mempertegas bahwa solusi akses pembiayaan UMKM harus berbasis pada konteks, bukan sekadar replikasi pendekatan makro yang belum tentu sesuai dengan karakteristik lokal masyarakat pelaku usaha.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap dinamika dan realitas kompleks yang dihadapi pelaku UMKM dalam mengakses permodalan, sekaligus menelaah dampaknya terhadap keberlanjutan usaha. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat menggali narasi pengalaman, persepsi, serta strategi bertahan para pelaku UMKM, khususnya dalam konteks sosial ekonomi lokal Kabupaten Grobogan. Di samping itu, data kuantitatif juga digunakan sebagai pelengkap, yaitu melalui kuesioner tertutup dengan skala Likert lima poin. Hal ini bertujuan memperkuat temuan kualitatif dengan gambaran statistik yang lebih representatif, terutama dalam mengukur persepsi literasi keuangan dan hambatan akses modal secara terstruktur.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, sebagai daerah yang memiliki karakteristik ekonomi agraris dan konsentrasi UMKM yang tinggi di sektor perdagangan, kuliner, kerajinan, dan jasa. Seluruh kecamatan di kabupaten ini dijadikan cakupan wilayah studi, agar hasil penelitian mencerminkan variasi kondisi antarwilayah, baik

dari sisi infrastruktur pendukung, akses lembaga keuangan, maupun kualitas kelembagaan lokal. Waktu pelaksanaan pengumpulan data berlangsung selama dua bulan, yaitu dari Juli hingga Agustus 2025. Pemilihan periode ini mempertimbangkan waktu operasional pelaku UMKM pasca Lebaran dan awal semester kedua, di mana aktivitas bisnis relatif stabil dan tidak terganggu oleh musim liburan atau kampanye pemilu daerah.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik yang saling melengkapi. Pertama, kuesioner tertutup dibagikan kepada responden pelaku UMKM untuk mengukur persepsi mereka terhadap hambatan permodalan dan tingkat literasi keuangan yang dimiliki. Skala Likert lima poin digunakan agar responden dapat mengungkapkan intensitas sikap atau penilaiannya secara lebih nuansa. Kedua, wawancara mendalam dilakukan terhadap pelaku UMKM, serta diskusi kelompok terarah (FGD) yang melibatkan perwakilan dari OPD teknis (seperti Dinas Koperasi dan UMKM), lembaga keuangan lokal (bank, koperasi, BPR), dan komunitas UMKM. Ketiga, observasi langsung ke lapangan dilakukan untuk mengamati praktik usaha, pembukuan, serta interaksi pelaku usaha dengan sistem keuangan. Terakhir, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber resmi seperti Bappeda, BPS, dan dokumen perencanaan daerah yang relevan.

Dalam menganalisis data kuantitatif, peneliti menggunakan perangkat lunak SPSS versi 27. Dua tahap analisis utama diterapkan. Pertama adalah uji frekuensi untuk memetakan distribusi jawaban responden atas indikator-indikator kunci, seperti persepsi terhadap bunga pinjaman, kemudahan prosedur, dan pemahaman literasi keuangan dasar. Tahap kedua adalah uji korelasi Pearson yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel tingkat literasi keuangan dengan kemudahan akses permodalan. Temuan ini penting untuk membuktikan secara statistik apakah peningkatan literasi keuangan memang berbanding lurus dengan akses terhadap pembiayaan formal.

Sementara itu, data kualitatif dianalisis menggunakan pendekatan SWOT. Teknik ini memungkinkan identifikasi faktor internal (kekuatan dan kelemahan) serta faktor eksternal (peluang dan ancaman) yang memengaruhi akses UMKM terhadap permodalan. Hasil pemetaan SWOT kemudian dituangkan ke dalam matriks strategi S-O (*strength-opportunity*), W-O (*weakness-opportunity*), S-T (*strength-threat*), dan W-T (*weakness-threat*) sebagai landasan penyusunan strategi. Strategi tersebut disusun untuk menjawab pertanyaan utama penelitian: bagaimana memberdayakan UMKM Grobogan agar lebih berdaya dalam mengakses pembiayaan dan bertahan dalam tekanan lingkungan usaha yang dinamis.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini mencakup panduan wawancara semi-terstruktur, kuesioner tertutup untuk survei persepsi, dan formulir observasi untuk pencatatan

temuan lapangan. Penggunaan kombinasi instrumen ini dirancang agar mampu menangkap aspek objektif dan subjektif secara seimbang. Dalam proses penyusunan kerangka konseptual, penelitian ini merujuk pada lima teori utama. Teori Akses terhadap Pembiayaan dari Beck & Demirgüç-Kunt (2006) digunakan untuk memahami hambatan struktural dalam sistem keuangan. Teori Literasi Keuangan dari Lusardi & Mitchell (2011) menjelaskan pengaruh pemahaman keuangan terhadap pengambilan keputusan usaha. *Triple Bottom Line* Elkington (1997) digunakan untuk menilai aspek keberlanjutan dari dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Analisis SWOT menurut Humphrey (2005) memberikan struktur analitis untuk mengidentifikasi posisi strategis UMKM dalam ekosistem lokal, sementara Teori Kelembagaan menurut Scott (2005) membantu menjelaskan peran norma, aturan formal, dan institusi informal dalam membentuk perilaku ekonomi pelaku UMKM. Kelima teori ini membentuk fondasi teoretis yang kuat untuk menjelaskan keterkaitan antara literasi keuangan, akses permodalan, dan keberlanjutan usaha UMKM dalam konteks Grobogan. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya menyajikan deskripsi keadaan, tetapi juga memberikan analisis mendalam yang kontekstual dan berorientasi solusi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil pengolahan kuesioner terhadap 117 responden pelaku UMKM di Kabupaten Grobogan menunjukkan gambaran yang cukup beragam terkait jenis usaha yang dijalankan. Mayoritas responden mengelompokkan jenis usahanya ke dalam kategori “Lainnya,” yaitu sebanyak 86 unit usaha, yang mencakup berbagai sektor seperti jasa, perdagangan umum, dan usaha berbasis rumah tangga. Sementara itu, kategori usaha Kuliner atau Makanan Olahan menempati posisi kedua dengan jumlah 29 responden, mencerminkan tingginya potensi subsektor ini di tengah budaya konsumtif masyarakat. Sisanya, sebanyak 2 unit usaha termasuk dalam kategori Kerajinan atau Kriya, yang meskipun jumlahnya kecil, tetap mencerminkan keberadaan potensi ekonomi kreatif lokal yang perlu didukung untuk tumbuh secara berkelanjutan.

Dari aspek usia usaha, diketahui bahwa sebagian besar UMKM di Kabupaten Grobogan masih tergolong baru. Sekitar 75% responden menyatakan bahwa usaha mereka baru berdiri dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Ini menunjukkan bahwa ekosistem kewirausahaan lokal tengah mengalami dinamika pertumbuhan, namun juga menyiratkan perlunya penguatan kelembagaan dan dukungan berkelanjutan, terutama bagi usaha-usaha yang masih berada

dalam fase awal pengembangan. Sebaliknya, hanya sekitar 25% UMKM yang telah beroperasi selama lebih dari 10 tahun, yang mengindikasikan bahwa sebagian kecil pelaku usaha telah mampu bertahan dalam jangka panjang, meskipun dengan berbagai tantangan yang terus dihadapi.

Fakta ini penting untuk dicermati oleh para pemangku kepentingan, karena usia usaha berkorelasi erat dengan stabilitas operasional, kemampuan adaptasi terhadap perubahan pasar, serta akses terhadap pembiayaan formal. UMKM yang masih baru biasanya menghadapi hambatan dalam memenuhi persyaratan administratif perbankan, memiliki rekam jejak keuangan yang terbatas, dan masih membangun jaringan pasar. Oleh karena itu, perhatian khusus perlu diberikan untuk mendampingi kelompok usaha ini agar tidak hanya bertahan dalam jangka pendek, tetapi juga mampu tumbuh dan memberikan kontribusi ekonomi secara berkelanjutan. Terutama bagi usaha di luar sektor kuliner dan kriya yang sering kali tidak terstandarkan, program pembinaan yang lebih intensif dan tersegmentasi perlu dikembangkan.

Dengan demikian, karakteristik UMKM di Grobogan mencerminkan sebuah lanskap usaha mikro yang sedang tumbuh, namun masih menghadapi tantangan struktural dalam hal daya tahan usaha, diferensiasi produk, dan akses terhadap pendampingan yang memadai. Pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan lembaga pendamping UMKM diharapkan dapat menjadikan temuan ini sebagai dasar dalam menyusun strategi pemberdayaan yang lebih tepat sasaran. Intervensi yang tidak hanya fokus pada pembiayaan, tetapi juga peningkatan kapasitas manajerial dan digitalisasi usaha sangat diperlukan untuk menjawab kebutuhan kelompok usaha yang masih dalam fase rawan ini. Keberlanjutan UMKM di Grobogan akan sangat ditentukan oleh kemampuan semua pihak untuk membangun ekosistem yang mendukung transformasi dari usaha bertahan menuju usaha yang tumbuh dan bersaing.

Hasil analisis data yang disajikan dalam Tabel 1 menunjukkan bahwa tantangan utama yang dihadapi UMKM di Kabupaten Grobogan masih didominasi oleh persoalan permodalan. Mayoritas pelaku UMKM sebanyak 33 responden mengandalkan tabungan pribadi sebagai sumber utama modal usaha mereka, dibandingkan hanya 9 yang memperoleh dukungan dari pinjaman pihak lain dan 9 lainnya dari institusi perbankan. Ketergantungan terhadap modal internal ini menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha belum dapat mengakses skema pembiayaan eksternal secara optimal. Hambatan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti persyaratan agunan yang tidak terpenuhi, minimnya dokumentasi usaha yang formal, serta rendahnya kapasitas administrasi dan literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM. Hal ini mencerminkan bahwa sistem pendanaan yang tersedia belum sepenuhnya inklusif dan akomodatif terhadap karakteristik pelaku usaha mikro di daerah.

Selain masalah permodalan, tantangan signifikan lainnya adalah terkait pemasaran dan persaingan usaha. Tercatat 21 responden menyatakan bahwa mereka menghadapi kendala dalam memasarkan produk, dan sebagian besar (juga) masih mengandalkan dana dari tabungan pribadi. Sementara hanya sedikit yang mampu memanfaatkan pinjaman dari pihak lain maupun perbankan untuk mendukung aktivitas pemasaran mereka. Persaingan usaha juga menjadi tantangan tersendiri bagi 9 responden, dan lagi-lagi mayoritas pembiayaannya berasal dari tabungan sendiri. Data ini memperkuat temuan bahwa walaupun aspek-aspek lain seperti distribusi dan kompetisi pasar turut menjadi kendala, akar masalah utama tetap berkisar pada terbatasnya modal yang tersedia secara likuid dan dukungan eksternal yang kurang. Hal ini berdampak langsung terhadap fleksibilitas pelaku UMKM dalam berinovasi, memperluas jaringan pasar, dan bertahan dalam kompetisi usaha yang makin ketat.

Pola umum dari data ini menegaskan bahwa UMKM di Grobogan masih berada dalam kondisi yang sangat bergantung pada sumber daya internal, terutama modal pribadi. Ketergantungan yang tinggi terhadap tabungan menunjukkan lemahnya inklusi keuangan di tingkat pelaku usaha mikro dan kecil. Sementara itu, rendahnya akses terhadap pembiayaan formal mengindikasikan adanya gap antara penyedia layanan keuangan dan kebutuhan riil pelaku usaha di lapangan. Untuk itu, diperlukan intervensi strategis dari pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan mitra pendamping UMKM untuk memperluas akses ke pembiayaan yang ramah terhadap UMKM. Pendekatan yang tidak hanya berbasis syarat administratif, tetapi juga berbasis pendampingan dan penguatan kapasitas keuangan pelaku usaha, sangat dibutuhkan untuk menjawab persoalan struktural dalam ekosistem pembiayaan UMKM di Kabupaten Grobogan.

Tabel 1. Tantangan Utama UMKM dan Sumber Permodalan

Tantangan Utama	Modal dari Tabungan	Modal dari Pinjaman Pihak Lain	Modal dari Pinjaman Perbankan
Permodalan	33	9	9
Pemasaran	21	3	2
Persaingan Usaha	9	2	3
Lainnya	21	2	3

Hasil survei menunjukkan sebagian besar pelaku UMKM belum sepenuhnya memahami prosedur pembiayaan. Rinciannya disajikan dalam Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Indikator Akses Permodalan dan Literasi Keuangan UMKM

Indikator	Kategori Jawaban	Jumlah
Proses Pengajuan Pinjaman	Ya (Lancar)	54
	Ya (Rumit)	4
	Tidak Pernah	59
Punya Jaminan	Ya	67
	Tidak	50
Paham Prosedur Pinjaman	Paham	55
	Belum Paham	62
Pelatihan Keuangan	Ya Pernah	38
	Belum Pernah	79
Keberlanjutan Usaha	Masih Berlanjut	88
	Tidak Berlanjut	29

Berdasarkan hasil survei yang disajikan dalam Tabel 2, tampak jelas bahwa mayoritas pelaku UMKM di Kabupaten Grobogan belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai prosedur pembiayaan formal. Sebanyak 50% responden mengaku belum pernah mengajukan pinjaman, dan hanya 46% yang menyatakan proses pengajuan mereka berjalan lancar. Jumlah ini menunjukkan bahwa akses terhadap lembaga keuangan formal masih sangat terbatas. Hambatan utama bukan hanya terletak pada minimnya informasi, tetapi juga pada syarat administratif seperti agunan: 43% responden menyatakan tidak memiliki jaminan yang dibutuhkan. Hal ini menjadi faktor penghambat signifikan dalam mengakses fasilitas pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau skema pembiayaan mikro lainnya.

Survei juga menyoroti lemahnya literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM. Sekitar 53% responden belum memahami prosedur pengajuan pinjaman, yang artinya lebih dari separuh pelaku usaha tidak memiliki pengetahuan dasar tentang proses pembiayaan. Selain itu, sebanyak 68% belum pernah mengikuti pelatihan keuangan, menandakan bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum terpapar pada pendidikan keuangan yang dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola usaha secara berkelanjutan. Rendahnya literasi keuangan ini tidak hanya menghambat akses terhadap pembiayaan, tetapi juga berpotensi memperbesar risiko kegagalan usaha akibat pengelolaan modal yang tidak efektif atau tidak optimal.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, sebagian besar UMKM masih mampu bertahan. Sebanyak 75% responden menyatakan bahwa usaha mereka masih berjalan, meskipun dalam skala terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM memiliki ketahanan yang relatif tinggi, namun potensi ini belum sepenuhnya dikembangkan secara optimal. Untuk meningkatkan keberlanjutan dan skala usaha, diperlukan intervensi yang bersifat integratif: tidak hanya memperluas akses pembiayaan yang inklusif dan fleksibel, tetapi juga membangun kapasitas pelaku UMKM melalui pelatihan keuangan, pendampingan bisnis, dan penguatan literasi keuangan. Dengan demikian, tantangan struktural yang dihadapi UMKM di Grobogan dapat diatasi secara lebih sistematis dan berkelanjutan.

Hasil wawancara mendalam dengan 10 instansi terkait di Kabupaten Grobogan, yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan perbankan lokal, mengungkapkan berbagai isu strategis yang menjadi hambatan utama dalam akses permodalan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Grafik dalam Gambar 1 menunjukkan bahwa kesulitan akses terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi isu paling dominan, disusul oleh minimnya sosialisasi terhadap program subsidi bunga seperti “Kumda Dewi Sri.” Meskipun program ini secara teoritis telah dirancang untuk membantu UMKM, dalam praktiknya masih banyak kendala administratif dan teknis yang menyebabkan implementasinya belum optimal. Kurangnya pemahaman pelaku UMKM terhadap mekanisme program dan syarat-syarat yang ditetapkan menjadi penghalang serius yang menyebabkan banyak pelaku usaha enggan memanfaatkan fasilitas yang sebenarnya tersedia.

Rendahnya tingkat literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM juga memperburuk situasi, khususnya dalam hal kepercayaan terhadap lembaga keuangan formal. Banyak pelaku usaha masih merasa tidak percaya diri untuk mengakses pinjaman formal karena persepsi rumitnya prosedur dan kekhawatiran terhadap risiko gagal bayar. Lebih jauh, pelatihan manajemen keuangan yang seharusnya menjadi pintu masuk untuk meningkatkan kapasitas manajerial UMKM, belum tersebar secara merata, terutama di wilayah pedesaan yang akses terhadap informasi dan pelatihan masih terbatas. Ketimpangan ini mengakibatkan pelaku UMKM di desa menjadi kelompok yang paling rentan dalam hal akses permodalan. Oleh karena itu, sinergi antar instansi, perluasan program pelatihan, serta penyederhanaan prosedur pembiayaan menjadi strategi penting yang harus segera diimplementasikan untuk menjembatani kesenjangan ini.

Skor_Literasi_Keuangan					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.333333333333334	3	2.6	2.6	2.6
	2.666666666666667	4	3.4	3.4	6.0
	3.000000000000000	8	6.8	6.8	12.8
	3.333333333333334	24	20.5	20.5	33.3
	3.666666666666667	28	23.9	23.9	57.3
	4.000000000000000	20	17.1	17.1	74.4
	4.333333333333333	19	16.2	16.2	90.6
	4.666666666666667	10	8.5	8.5	99.1
	5.000000000000000	1	.9	.9	100.0
	Total	117	100.0	100.0	

Gambar 1. Uji Frekuensi untuk Literasi Keuangan

Berdasarkan uji frekuensi skor literasi keuangan, mayoritas responden berada pada kategori menengah. Sebanyak 28 responden (23,9%) memiliki skor 3,67 dan 24 responden (20,5%) dengan skor 3,33. Hanya 1 responden (0,9%) yang mencapai skor 5 (sangat tinggi), sedangkan 3 responden (2,6%) berada pada skor 2,33 (rendah). Distribusi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Kabupaten Grobogan memiliki tingkat literasi keuangan yang cukup, tetapi belum optimal untuk mendukung pengelolaan keuangan usaha secara profesional.

Skor_Akses_Permodalan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.666666666666667	2	1.7	1.7	1.7
	2.000000000000000	17	14.5	14.5	16.2
	2.333333333333334	23	19.7	19.7	35.9
	2.666666666666667	34	29.1	29.1	65.0
	3.000000000000000	16	13.7	13.7	78.6
	3.333333333333334	16	13.7	13.7	92.3
	3.666666666666667	5	4.3	4.3	96.6
	4.000000000000000	3	2.6	2.6	99.1
	4.333333333333333	1	.9	.9	100.0
Total		117	100.0	100.0	

Gambar 2. Uji Frekuensi untuk Akses Permodalan

Hasil uji frekuensi pada skor akses permodalan menunjukkan bahwa 34 responden (29,1%) memiliki skor 2,67 dan 23 responden (19,7%) berada pada skor 2,33, sedangkan hanya 1 responden (0,9%) mencapai skor tertinggi 4,33. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas UMKM masih mengalami keterbatasan dalam mengakses permodalan formal, dengan kecenderungan mengandalkan sumber pembiayaan non-formal atau tabungan pribadi.

Correlations

		Skor_Literasi_Kuangan	Skor_Akses_Permodalan
Skor_Literasi_Kuangan	Pearson Correlation	1	.009
	Sig. (2-tailed)		.922
	N	117	117
Skor_Akses_Permodalan	Pearson Correlation	.009	1
	Sig. (2-tailed)	.922	
	N	117	117

Gambar 3. Uji Korelasi antara Literasi Keuangan dan Akses Permodalan

Berdasarkan hasil uji frekuensi skor literasi keuangan, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Kabupaten Grobogan memiliki tingkat literasi keuangan pada

kategori menengah. Sebanyak 28 responden (23,9%) berada pada skor 3,67 dan 24 responden (20,5%) pada skor 3,33. Ini menunjukkan bahwa hampir separuh responden memiliki kemampuan dasar dalam memahami konsep keuangan, seperti pencatatan, manajemen kas, dan pemisahan keuangan usaha. Namun, hanya 1 responden (0,9%) yang mencapai skor tertinggi yaitu 5, menandakan masih sangat terbatasnya UMKM dengan literasi keuangan tingkat tinggi. Sebaliknya, skor rendah (2,33 ke bawah) dimiliki oleh 3 responden (2,6%), yang menjadi indikator perlunya intervensi pendidikan keuangan secara lebih sistematis.

Sementara itu, uji frekuensi terhadap skor akses permodalan menunjukkan bahwa keterbatasan akses modal masih menjadi tantangan signifikan. Sebanyak 34 responden (29,1%) berada pada skor 2,67 dan 23 responden (19,7%) pada skor 2,33. Dengan mayoritas skor yang berada di bawah angka 3, terlihat bahwa akses pembiayaan formal masih belum optimal. Hanya 1 responden (0,9%) yang memiliki akses permodalan sangat baik dengan skor 4,33, yang menandakan dominasi pembiayaan informal atau penggunaan tabungan pribadi sebagai sumber utama modal. Rendahnya skor ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya informasi mengenai produk perbankan, ketidakmampuan memenuhi persyaratan administrasi, serta persepsi negatif terhadap institusi keuangan.

Ketika dilakukan uji korelasi Pearson antara tingkat literasi keuangan dan akses permodalan, diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,009 dengan nilai signifikansi 0,922, yang jauh di atas batas signifikansi 0,05. Ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut. Temuan ini cukup mengejutkan karena secara teoritis, literasi keuangan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam mengakses permodalan. Fakta ini mengindikasikan bahwa ada variabel lain yang lebih dominan memengaruhi akses permodalan, seperti faktor struktural (misalnya agunan), kebijakan perbankan lokal, atau bahkan hambatan budaya dan psikologis. Oleh karena itu, intervensi kebijakan untuk memperluas akses permodalan tidak cukup hanya melalui pelatihan literasi, tetapi juga harus disertai dengan reformasi kebijakan pembiayaan, penyederhanaan prosedur, dan pendekatan pendampingan yang lebih komprehensif.

Analisis SWOT terhadap permasalahan akses permodalan UMKM di Kabupaten Grobogan mengungkap berbagai kekuatan dan kelemahan internal yang perlu dikelola secara strategis. Di sisi kekuatan (*strengths*), UMKM menunjukkan ketahanan usaha yang tinggi dengan mengandalkan modal internal dari tabungan pribadi atau keluarga, serta kemampuan mempertahankan keberlanjutan usaha dalam kondisi terbatas. Beberapa pelaku usaha juga telah memiliki agunan yang memudahkan mereka mengakses lembaga keuangan formal, serta mampu melakukan diversifikasi produk dalam skala kecil. Skala mikro dari mayoritas UMKM

juga menjadi kekuatan karena menciptakan fleksibilitas dalam perputaran modal. Namun, kelemahan yang menonjol adalah rendahnya literasi keuangan dan ketidaktahuan terhadap prosedur pembiayaan formal. Banyak pelaku usaha belum pernah mengakses pinjaman, masih tergantung pada sumber modal terbatas, dan belum tergabung dalam kelompok usaha atau koperasi, yang dapat memperkuat posisi mereka dalam akses pembiayaan. Hambatan dalam hal teknologi dan literasi digital juga memperparah keterisolasian mereka dari ekosistem keuangan modern.

Di sisi eksternal, peluang (*opportunities*) terbuka luas dengan adanya berbagai program permodalan dari pemerintah, seperti KUR dan UMi, kehadiran lembaga keuangan tingkat desa seperti BUMDes dan koperasi, serta program literasi keuangan dari berbagai pihak. Selain itu, kemudahan dalam pengurusan izin usaha (NIB) dan meningkatnya permintaan pasar juga membuka ruang ekspansi bagi UMKM yang ingin berkembang. Akan tetapi, ancaman (*threats*) juga cukup signifikan. Ketergantungan pada skema kredit berbasis agunan, kurangnya informasi tentang pembiayaan, serta stigma terhadap birokrasi pinjaman yang rumit menyebabkan pelaku UMKM cenderung enggan mencari alternatif pendanaan. Maraknya praktik pinjaman ilegal atau rentenir menjadi ancaman serius, apalagi jika tidak ada pendampingan dan evaluasi usaha pasca-pinjaman. Ketimpangan akses karena faktor geografis juga membuat sebagian pelaku UMKM kesulitan menjangkau lembaga keuangan formal. Oleh karena itu, strategi penguatan akses permodalan UMKM perlu memadukan kekuatan dan peluang yang ada, sembari memitigasi kelemahan dan ancaman secara sistematis.

Analisis SWOT dari permasalahan di atas dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3. Hasil Analisis SWOT

Strengths (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)
• Modal dari tabungan (sendiri atau dari keluarga) sehingga tidak bergantung pada pinjaman luar. • Mempunyai jaminan atau agunan yang memudahkan akses ke lembaga pembiayaan formal. • Ketahanan usaha yang kuat sehingga usaha berlanjut meskipun dalam kondisi keterbatasan modal. • Diversifikasi produk meskipun dengan skala usaha kecil. • Banyak UMKM berskala mikro kecil, sehingga perputaran modal lebih fleksibel dan adaptif.	• Rendahnya pemahaman terhadap prosedur pinjaman formal. • Kurangnya pelatihan atau literasi tentang manajemen keuangan. • Ketergantungan pada modal tabungan atau modal internal yang terbatas. • UMKM banyak yang berjalan sendiri-sendiri, tidak tergabung dalam kelompok atau koperasi. • Kurangnya inisiatif untuk menjangkau sumber modal alternatif. • Kendala bahasa teknologi dan rendahnya literasi digital. • Banyak pelaku UMKM belum pernah mengakses pinjaman sama sekali.
Opportunities (Peluang)	Threats (Ancaman)
• Adanya program pemerintah untuk permodalan UMKM seperti KUR dan UMi.	• Ketergantungan pada skema kredit yang masih berbasis agunan.

-
- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Adanya lembaga keuangan sampai tingkat desa seperti BUMDes atau koperasi.• Adanya program literasi keuangan dari pemerintah, bank, dan lembaga swasta.• Kemudahan perizinan (NIB) sebagai syarat mendaftar ke lembaga keuangan.• Banyaknya skema permodalan atau pembiayaan dari CSR atau mitra usaha.• Dukungan CSR dari perusahaan untuk menambah pembiayaan usaha kecil.• Peningkatan permintaan pasar membuat UMKM lebih mudah mendapatkan pembiayaan. | <ul style="list-style-type: none">• Minimnya informasi tentang skema pembiayaan yang tersedia.• Anggapan bahwa birokrasi dan prosedur pinjaman terlalu rumit.• Tingginya risiko pinjaman ilegal dan rentenir.• Tidak ada pendampingan atau evaluasi usaha pasca-pinjaman.• Kesenjangan wilayah (geografis dan akses lembaga keuangan) yang menyulitkan akses langsung. |
|---|--|
-

Pembahasan

Pembahasan mengenai kendala akses permodalan bagi pelaku UMKM di Kabupaten Grobogan mengungkap berbagai hambatan yang bersifat sistemik dan kultural. Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara, ditemukan bahwa persyaratan agunan menjadi penghalang utama bagi banyak pelaku UMKM untuk memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Selain itu, terdapat budaya usaha yang belum sepenuhnya mempercayai sistem perbankan, baik karena pengalaman negatif, minimnya pemahaman, maupun karena merasa bahwa prosedur terlalu birokratis dan tidak sesuai dengan skala usaha mereka. Kondisi ini sejalan dengan teori Beck & Demirgüç-Kunt (2006) tentang hambatan akses keuangan yang berasal dari faktor internal seperti literasi rendah dan eksternal seperti prosedur yang rumit.

Minimnya literasi keuangan juga menjadi faktor signifikan yang memperburuk keterbatasan akses modal. Sebagaimana dinyatakan oleh Lusardi & Mitchell (2011), literasi keuangan rendah menjadi penyebab utama kegagalan pelaku UMKM dalam memanfaatkan produk keuangan formal. Di Kabupaten Grobogan, mayoritas pelaku usaha masih mengandalkan tabungan pribadi sebagai sumber utama permodalan. Kurangnya pelatihan manajemen keuangan serta pencatatan keuangan yang tidak terstruktur membuat mereka tidak mampu memenuhi persyaratan lembaga keuangan, terutama dalam proses evaluasi kelayakan kredit. Padahal, keberlanjutan UMKM tidak hanya bergantung pada modal finansial semata, tetapi juga modal sosial dan kelembagaan yang dapat diperkuat melalui pelatihan dan pendampingan.

Temuan dari wawancara dengan OPD dan perbankan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara desain program pembiayaan pemerintah dan realitas lapangan. Misalnya, program KUR dan Kumda Dewi Sri masih belum banyak dijangkau oleh pelaku UMKM skala mikro karena keterbatasan informasi dan persyaratan administratif yang dirasa memberatkan. Sementara pihak perbankan merasa telah menyederhanakan prosedur, namun persepsi pelaku usaha tetap menganggapnya rumit dan membingungkan. Selain itu, pelatihan

keuangan yang belum merata, khususnya di desa-desa, semakin memperbesar kesenjangan antara kebijakan dan implementasi.

Meskipun tingkat literasi keuangan UMKM berada pada kategori menengah, hal ini tidak serta merta berbanding lurus dengan kemampuan mereka mengakses modal. Hasil uji korelasi menunjukkan tidak adanya hubungan signifikan antara literasi keuangan dengan akses permodalan, yang memperkuat argumen bahwa faktor struktural lebih dominan sebagai penghambat. Dengan kata lain, peningkatan literasi keuangan saja tidak cukup jika tidak diiringi dengan reformasi prosedural dan peningkatan kepercayaan terhadap sistem keuangan. Studi IFC (2022) juga menegaskan bahwa meskipun literasi meningkat, *financing gap* tetap lebar jika tidak dibarengi dengan perubahan dari sisi lembaga keuangan.

Dari perspektif *Triple Bottom Line* (Elkington, 1997), upaya memperkuat UMKM tidak cukup hanya berfokus pada keuntungan ekonomi. Dibutuhkan juga pembangunan kepercayaan sosial terhadap lembaga keuangan dan kebijakan kelembagaan yang mendorong partisipasi. Kurangnya kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem keuangan formal menunjukkan bahwa kebijakan yang bersifat top-down perlu diimbangi dengan pendekatan berbasis komunitas yang membangun relasi, pendampingan, dan komunikasi dua arah antara UMKM dan lembaga pembiayaan.

Strategi penguatan UMKM perlu disusun dengan mengacu pada hasil analisis SWOT. Strategi SO misalnya, mendorong pemanfaatan kekuatan internal seperti ketahanan usaha dan tabungan pribadi dengan peluang eksternal berupa program pembiayaan dari pemerintah. Strategi WO menekankan penguatan kapasitas pelaku usaha melalui pelatihan literasi keuangan berbasis komunitas. Strategi ST mendorong terbentuknya kelompok usaha atau koperasi berbasis kepercayaan sebagai sarana mitigasi risiko birokrasi, sementara strategi WT bertujuan melindungi UMKM dari ancaman pinjaman ilegal melalui sistem pendampingan dan informasi keuangan yang terintegrasi.

Sebagai langkah konkret, rekomendasi kebijakan yang disusun dalam penelitian ini mencakup lima poin utama: (1) perluasan sosialisasi program pembiayaan hingga ke tingkat desa, (2) pelatihan rutin literasi keuangan yang disesuaikan dengan kondisi lokal, (3) penyederhanaan prosedur pinjaman oleh lembaga keuangan, (4) pembentukan kelompok usaha atau koperasi berbasis kepercayaan, serta (5) pengembangan sistem informasi keuangan berbasis desa. Dengan pendekatan ini, diharapkan UMKM di Kabupaten Grobogan tidak hanya mendapatkan akses yang lebih inklusif terhadap permodalan, tetapi juga mampu tumbuh secara berkelanjutan baik secara ekonomi, sosial, maupun kelembagaan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa permasalahan akses permodalan masih menjadi hambatan utama yang menghambat keberlanjutan UMKM di Kabupaten Grobogan. Sebagian besar pelaku usaha masih mengandalkan modal dari tabungan pribadi karena rendahnya pemahaman terhadap prosedur pinjaman formal, keterbatasan pelatihan keuangan, dan ketiadaan agunan. Faktor eksternal seperti birokrasi administrasi yang rumit, minimnya sosialisasi program pembiayaan hingga tingkat desa, serta rendahnya kepercayaan terhadap lembaga keuangan formal turut memperparah kesenjangan akses tersebut. Kondisi ini menggambarkan adanya jurang yang cukup lebar antara desain kebijakan pembiayaan yang tersedia dengan kebutuhan dan kapasitas riil pelaku UMKM di lapangan.

Melalui analisis SWOT, ditemukan bahwa meskipun UMKM memiliki potensi berupa ketahanan usaha, kemandirian modal awal, dan jejaring komunitas, hambatan berupa literasi keuangan yang belum memadai serta sistem pembiayaan yang belum inklusif tetap menjadi tantangan struktural yang signifikan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan ekosistem usaha yang lebih adil dan berkelanjutan, diperlukan langkah strategis seperti penguatan kelembagaan, pelatihan literasi keuangan berbasis komunitas, pendampingan akses pembiayaan yang responsif, serta pembentukan kelompok usaha berbasis kolektif. Langkah-langkah ini akan membantu menjembatani kesenjangan antara kebijakan pembiayaan dan kebutuhan nyata UMKM, sekaligus meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem keuangan formal.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan. (n.d.). *Data sosial ekonomi Kabupaten Grobogan*. <https://grobogankab.bps.go.id>
- Beck, T., & Demirguc-Kunt, A. (2006). Small and medium-size enterprises: Access to finance as a growth constraint. *Journal of Banking and Finance*, 30(11), 2931–2943. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2006.05.009>
- Clark, K. (2013). Financial literacy: Annotated bibliography. *Nasfaa*, 22(August), 1–17.
- Elkington, J. (1997). *Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business*. Capstone Publishing. <https://doi.org/10.1002/tqem.3310080106>
- Humphrey, A. S. (2005). SWOT analysis for management consulting. *SRI Alumni Association Newsletter*, 7–8.
- International Finance Corporation. (2022). *Improving access to finance for MSMEs: Challenges and recommendations in emerging markets*. World Bank Group.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2023). *Laporan tahunan pembiayaan UMKM nasional*.

- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2011). *Financial literacy and planning: Implications for retirement well-being* (A. S. Mitchell & O. S. Lusardi, Eds.). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199696819.003.0002>
- Mashenene, R. (2015). Constraints of accessing debt financing from commercial banks among small and medium enterprises in Tanzania: A literature review. *Journal of Emerging Issues in Economics, Finance and Banking (JEIEFB): An Online International Research Journal*, 4(2), 3–5.
- Pemkab Grobogan. (2024). *RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2025*. Bappeda Kabupaten Grobogan.
- Pemkab Grobogan. (2025). *Laporan kinerja pemerintah daerah tahun 2024*. Pemerintah Kabupaten Grobogan.
- Scott, W. R. (2005). Institutional theory: Contributing to a theoretical research program. In M. A. Smith, K. G., & Hitt (Eds.), *Institutional theory* (pp. 95–108). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780199276813.003.0022>
- Sinha, K., et al. (2024). Micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs): The significant role and challenges in Indonesia's economy. *International Journal for Multidisciplinary Research*, 6(3), 0–10. <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i03.20824>
- Sugiharti, R., Khabibah, N., & Septiani, Y. (2024). Pendampingan penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM pada UMKM di Desa Sukosari. *Penamas: Journal of Community Service*, 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.53088/penamas.v4i1.657>
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kombinasi (Mix methods)*. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Zhang, H. (2025). Perspectives on sustainable business strategy. *Academic Journal of Science and Technology*, 14(1). <https://doi.org/10.54097/1s4x5e82>
- Zhao, Z. (2024). Research on risk control and regulatory policies of financial institutions. *International Journal of Global Economics and Management*, 4(1), 257–265. <https://doi.org/10.62051/ijgem.v4n1.34>